

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak tanggal 1 Januari 2001, Indonesia melakukan reformasi besar-besaran di bidang pemerintahan dengan memberlakukan sistem desentralisasi fiskal (Efriza, 2014). Dengan desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat mewujudkan peran pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah dan memberikan pelayanan publik dengan pengelolaan keuangannya sendiri (Marfiana dan Kurniasih, 2013). Selanjutnya, Julastiana dan Suartana (2012) menjelaskan bahwa optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dimaknai dengan upaya pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan daerah dan menggunakannya dengan efisien dan efektif.

Pada tahun 2004 diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi, monitoring, dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (Marfiana dan Kurniasih, 2013).

Sebagaimana dijelaskan oleh Hermawan (2013), otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya yang memberikan arti bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahannya sendiri di luar urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kabir (2016) menyatakan bahwa dengan adanya sistem otonomi, daerah akan lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan preferensi masing-masing masyarakat. Selanjutnya, Nadir (2013) menyatakan bahwa pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri serta pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran akan lebih dimungkinkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI yang diharapkan mampu mengatur serta memberikan dampak yang baik kepada pemerintah. Lebih lanjut menurut UU tersebut dijelaskan bahwa tujuan dibuatnya UU ini adalah untuk mengatasi kesenjangan vertikal maupun horisontal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan adanya perbedaan potensi antar daerah.

Megadini (2017) menyatakan bila unsur-unsur desentralisasi tersebut harus berjalan beriringan dengan konsep yang jelas. Kemudian Sasana (2009) menjelaskan bahwa melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengoptimalkan potensinya. Pemerintah daerah pun dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerahnya (Astuti dan Mimba, 2016).

Hidayat (2016) menyatakan bahwa keberhasilan penerapan desentralisasi fiskal pada suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di daerah

tersebut dan pertumbuhan ekonomi yang optimal dapat dicapai melalui kebijakan ekonomi yang tepat. Selanjutnya Rondonuwu (2016) menjelaskan bahwa keleluasaan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang sesuai dengan daerahnya memberikan kesempatan yang besar untuk terus mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 224 / PMK.07 Tahun 2008 komponen-komponen desentralisasi fiskal terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Komponen-komponen tersebut juga merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi.

Sejauh ini belum banyak penelitian yang membahas mengenai desentralisasi fiskal yang memiliki variabel DAU, DAK, PAD, dan DBH terkait pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini perlu dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan referensi pelengkap terkait pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Waluyo (2007), Anwar, Palar, dan Sumual (2016), Anwar dan Hidayat (2016), Hendriwijayanto (2014), dan Permasari (2013) bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Pujiati (2008) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Anwar dan Hidayat (2016), dan Hendriwijayanto (2014) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Anwar, Palar, dan Sumual (2016) dan Permanasari (2013) menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pujiati (2008), Permanasari (2013), dan Hendriwijayanto (2014) menjelaskan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Prakarsa (2014) menjelaskan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Anwar, Palar, dan Sumual (2016) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya penelitian Pujiati (2008) dan Hendriwijayanto (2014) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Waluyo (2007) menjelaskan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 3, menunjukkan bahwa variabel independen ada yang berpengaruh positif, ada yang berpengaruh negatif, dan ada yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2015 atas dasar harga konstan tahun 2010. Penelitian ini ingin membuktikan apakah ada pengaruh DAU, DAK, PAD, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- b. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- c. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- d. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- b. Untuk menguji apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- c. Untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- d. Untuk menguji apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu keuangan publik terutama bidang desentralisasi fiskal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi praktisi dan pengambil kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut peningkatan pertumbuhan ekonomi.

